BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap kematian pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, dan tidak ada yang mengetahui kapan kematian akan terjadi. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya¹. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian yang pasti dialami oleh semua manusia. Dalam kematian usia bukan menjadi ukuran seseorang akan meninggal, karena sejatinya kematian itu Allah SWT yang menentukan. Dan kita sebagai manusia hanya mampu pasrah akan kehendak Allah SWT.

Pemakaman adalah hak setiap manusia yang telah meninggal, karena kematian datang secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu. Tanah makam merupakan kebutuhan setiap manusia untuk melakukan penguburan jenazah. Dimana itu merupakan hak setiap warga yang harus dipenuhi. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan di makam. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan atau diletakan di atas makam selain nisan. Kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai adat atau tradisi yang sampai saat ini bertahan. Pengkijingan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat setiap ada sanak keluarga yang meninggal.

¹ M Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, hal. 178

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara², Sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam berbangsa dan bernegara. Pengaturan Desa itu sendiri bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia³

Salah satu Desa di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdapat Peraturan Desa yang melarang melakukan pengkijingan di Makam. Permasalahan tersebut tidak bisa di biarkan. Karena peraturan tetaplah peraturan dimana harus di taati oleh semua lapisan masyarakat tanpa membedakan kasta. Sehingga perlu kesadaran hukum untuk semua masyarakat agar peraturan tersebut mampu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa dan tercipta ketertiban dalam bermasyarakat.

² Undang –Undang Desa Pasal 1 Ayat 1

³ Undang-Undang Desa Pasal 4 Ayat 1

Tanah makam sudah menjadi bagian terpenting dalam pemakaman di mana areal pemakaman umum sudah disediakan oleh pemerintah desa untuk kepentingan bersama. Karena setiap tahun pasti ada yang namanya kematian. Dan pada saat pemakaman dibutuhkanlah sebuah lahan / tanah untuk melakukan penguburan jenazah.

Dan dalam hukum Islam memuat banyak syariat-syariat yang dikhususkan untuk umat beragama Islam, salah satu diantaranya adalah pemakaman. Untuk orang yang baru saja meninggal, pasti akan dimakamkan pada tempat pemakaman yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Dalam hal itu setiap daerah atau desa memiliki adat istiadat yang berbeda seperti pemakaman.

Di antara sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan di tanah pemakaman umum pada saat ini adalah melakukan pengkijingan makam. Dimana masyarakat Desa Ketanon yang mayoritas Islam perlu ditinjau bagaimana hukumnya pengkijingan makam dalam hukum Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hijab - at-Asadi bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan *“maukah anda saya beri tugas sebagaimana saya ditugaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar setiap melihat patung hendaklah anda tumbangkan dan setiap menjumpai kubur yang ditinggikan anda datarkan”*.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pengkijingan**

Makam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) ”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengkijingan makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Pengkijingan Makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengkijingan makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengkijingan Makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara Teoretis.

Untuk digunakan sebagai dasar dan bahan hukum pada akademik, dan masyarakat secara umum sekalian dengan meningkat kesadaran hukum terhadap masyarakat agar bisa menjalankan peraturan dengan baik dan benar demi kemaslahatan bersama.

2. Secara Praktis.

- a. Bagi Penulis.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peraturan Desa Tentang Pemakaman Khususnya dalam penerapannya.

- b. Bagi Pemerintah Desa.

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Desa Plosokandang dalam setiap pembuatan Peraturan Desa agar Peraturan Tersebut dapat berjalan dengan baik dalam penerapannya sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdsarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

- c. Bagi Masyarakat.

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum/pembaca terutama mengenai Peraturan Desa yang ada dan meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar terjadi kontrol sosial yang baik dalam hidup bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah.

1. Penegasan Konseptual.
 - a. Pengkijingan Makam adalah batu penutup makam yang menyatu dengan nisannya (terbuat dari pualam, tegel, semen).⁴
 - b. Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tinggah laku mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁵

2. Penegasan Operasional.

Maksud dari penelitian yang berjudul “Pengkijingan Makam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) “ adalah meneliti bagaimana Peraturan Desa tersebut dalam sebuah desa apakah dalam penerapannya sudah sesuai sehingga Peraturan desa tersebut memiliki roh dalam melakukan aksinya dan dapat dijadikan sebagai kontrol sosial dalam bermasyarakat serta bagaimana dalam perspektif hukum islam mengenai pengkijingan makam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal. 616

⁵ Eva Iryani, “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*” vol. 17 No. 2 Tahun 2017 Universitas Batanghari Jambi, hal 24.

hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian

Bab kelima adalah berisi mengenai pembahasan

Bab Keenam adalah kesimpulan dan saran